

BAB V PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT KAI telah berhasil mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui situs web PPID. Peneliti melihat keberhasilan implementasi berdasarkan kesesuaian implementasi KIP dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan berdasarkan aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan model implementasi Edward III.

1. Dari aspek komunikasi, PPID PT KAI secara aktif melakukan sosialisasi baik kepada pegawai internal maupun masyarakat luas. Sosialisasi melalui workshop dan media sosial telah meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya keterbukaan informasi. Namun, rotasi pegawai seringkali menyebabkan hilangnya pengetahuan dan keahlian terkait pengelolaan informasi, sehingga perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi pelayanan
2. Pada aspek sumber daya, PT KAI telah menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perusahaan juga telah mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan program-program terkait. Pelatihan rutin bagi pegawai PPID telah meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

3. Dalam aspek disposisi, komitmen pegawai PPID PT KAI dalam menjalankan tugasnya terlihat dari penerapan budaya perusahaan "AKHLAK" yang mendorong etos kerja kolaboratif dan responsif. Penghargaan eksternal, seperti predikat Badan Publik Informatif, turut memperkuat motivasi pegawai. Hal ini memperlihatkan bahwa sikap positif dan dedikasi pegawai merupakan faktor kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan keterbukaan informasi.
4. Dari segi struktur birokrasi, PPID PT KAI memiliki struktur organisasi yang ringkas dan terarah, yang memudahkan pengambilan keputusan dan mempercepat proses pelayanan informasi. Struktur yang fleksibel ini sesuai dengan prinsip Edward III bahwa birokrasi yang efektif dapat mendukung implementasi kebijakan dengan baik. Pembaharuan SOP secara berkala dan memadai juga berperan secara positif dalam mewujudkan struktur birokrasi yang baik.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PT KAI menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan ini dicapai melalui kombinasi komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, disposisi pegawai yang baik, dan struktur birokrasi yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dalam teori Edward III telah mendukung PT KAI dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.

5. 2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, implikasi yang didapat dari penelitian implementasi keterbukaan informasi publik oleh PT KAI melalui situs web PPID diantaranya adalah:

1. Dalam aspek komunikasi, komunikasi yang aktif oleh PPID PT KAI meningkatkan aksesibilitas dan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Melalui program sosialisasi yang rutin dan pemanfaatan berbagai kanal komunikasi seperti situs web PPID, aplikasi mobile, dan media sosial, PPID mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Namun, tantangan komunikasi internal, seperti rotasi pegawai, berpotensi menghambat kelancaran alur informasi dan menurunkan kualitas koordinasi antar pegawai, sehingga memerlukan strategi mitigasi untuk memastikan efektivitas komunikasi tetap terjaga. Dalam konteks implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III, faktor komunikasi yang optimal dapat memperkuat keberhasilan kebijakan, tetapi hambatan internal seperti ini harus diminimalkan agar implementasi dapat berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi tantangan rotasi pegawai, PT KAI dapat mengembangkan modul pelatihan yang terstandar memastikan bahwa seluruh pegawai yang baru bergabung dalam unit terkait memahami mekanisme keterbukaan informasi publik dan menyeragamkan kualitas pelayanan informasi publik di setiap daerah.

2. Dalam aspek sumber daya, penyediaan sumber daya yang memadai oleh PT KAI, termasuk fasilitas yang ramah disabilitas, alokasi anggaran, dan sumber daya manusia yang mencukupi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID. Pelatihan rutin yang diselenggarakan bagi pegawai PPID juga berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dengan tersedianya fasilitas yang inklusif, PT KAI mampu memastikan akses informasi yang lebih luas, termasuk bagi penyandang disabilitas.
3. Dalam aspek disposisi, disposisi yang kuat di kalangan pegawai PPID PT KAI menciptakan pelayanan informasi publik yang responsif dan berkualitas. Penerapan budaya perusahaan "AKHLAK" yang menanamkan etos kerja kolaboratif dan sikap responsif telah mendorong pegawai untuk menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi. Sementara penghargaan eksternal, seperti predikat Badan Publik Informatif, meningkatkan motivasi dan rasa bangga pegawai terhadap pekerjaannya.
4. Dalam aspek struktur birokrasi, struktur birokrasi PPID PT KAI yang ringkas dan terarah dan SOP yang jelas memberikan panduan operasional yang efektif menciptakan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan percepatan proses pelayanan informasi publik. Struktur yang fleksibel ini mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi secara efek